

LAPORAN KINERJA

2022



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 juga bertujuan sebagai:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) dan semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 2 Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6,5	7,4	113,85
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,63	93,41

Sebagai mana terlihat pada table diatas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 di peroleh hasil rata-rata capaian 103,63% kategori AA (sangat memuaskan). Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 11.614.900.960, dialokasikan sebesar Rp. 3.524.852.220,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.485,004,069,- atau 42,13%. Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar 30,35%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,65%. Dari angka efisiensi anggaran sebesar 30,35% disebabkan karena adanya penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibebankan di belanja langsung. Apabila dibandingkan dengan belanja langsung di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN maka didapat efisiensi sebesar 69,19% yang mana dapat dinilai baik.

Ranai, 24 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 24 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum BP3D.....	4
1.5. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis BP3D Tahun 2021-2026.....	10
2.1.1. Visi dan Misi.....	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	21
3.2. Analisa Kinerja.....	22
3.3. Analisis Keuangan.....	40
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Struktur Organisasi BP3D.....	6
Tabel II.1	: Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja BP3D	13
Tabel II.2	: Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel II.4	: Program dan Kegiatan Pendukung IKU	15
Tabel II.5	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	18
Tabel III.1	: Skala Penilaian	22
Tabel III.2	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022	22
Tabel III.3	: Kerangka Pengukuran IDSD 2022.....	29
Tabel III.4	: Skor IDSD Kabupaten Natuna 2022.....	31
Tabel III.5	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Institusi.....	32
Tabel III.6	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Infrastruktur.....	32
Tabel III.7	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Adopsi TIK.....	33
Tabel III.8	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Stabilitas Makro Ekonomi	33
Tabel III.9	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kesehatan.....	33
Tabel III.10	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Keterampilan.....	34
Tabel III.11	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Produk.....	34
Tabel III.12	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Tenaga Kerja.....	35
Tabel III.13	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Sistem Keuangan.....	35
Tabel III.14	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar.....	35
Tabel III.15	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Dinamisme Bisnis.....	36
Tabel III.16	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kapabilitas Inovasi.....	36
Tabel III.17	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 – 2022.....	39
Tabel III.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD.....	40
Tabel III.19	: Laporan Realisasi Anggaran	41
Tabel IV.1	: Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2021-2026 Tahun Anggaran 2022.....	46 48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja
- Lampiran II : Pengukuran Kinerja
- Lampiran III : Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna
- Lampiran IV : Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi. Adapun tujuan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun ini antara lain:

01 Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

02 Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.4. Gambaran Umum BP3D

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

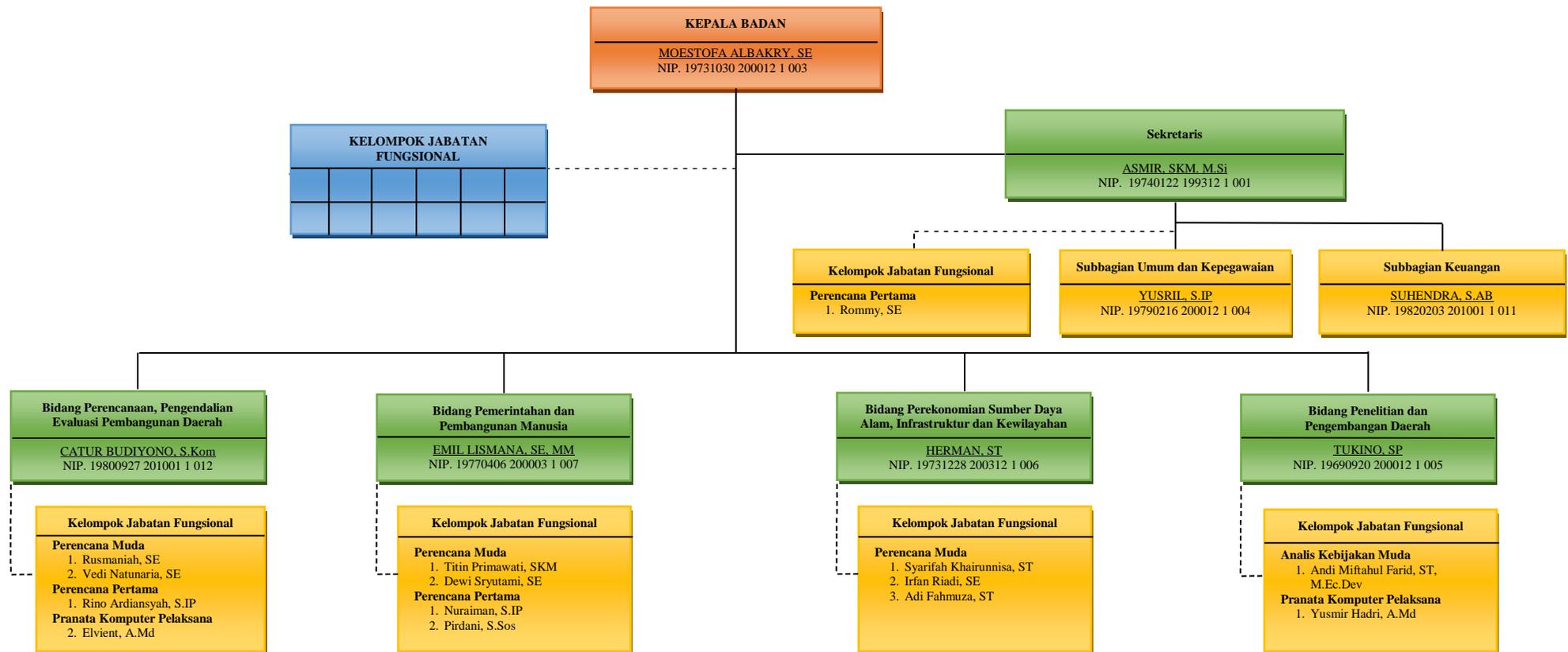
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pegkajian kebijakan daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi
- Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel. I.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) BP3D Kabupaten Natuna Tahun 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022



KEPALA BP3D KABUPATEN NATUNA

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2022 yang menjadi acuan pengukuran kinerja yang berarti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja.

- 2.1. Rencana Strategis
Menguraikan tentang :
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisis Kinerja
- 3.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntalibitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran :

- Perjanjian/Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
- Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengthness*), kelemahan (*weakneses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1. Rencana Strategis BP3D Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang mana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.



Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Keputusan Kepala BP3D Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi yang ingin dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan telaahan dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya
Kabupaten Natuna
sebagai
Kabupaten Maritim
yang
Unggul, Eksotis,
Aman, dengan
Kemandirian
Ekonomi
Berlandaskan
Nilai Religius dan
Kultural”***

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

❖ **Maritim yang Unggul**

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim

❖ **Eksotis**

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

❖ **Aman**

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

❖ **Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya,

Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

❖ **Religius**

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

❖ **Kultural**

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

MISI

Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

1

Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2

Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

3

Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

4

Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

5

Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

6

Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

7

Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu **“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)”**. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna dijabarkan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)”			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna yaitu:

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Penghitungan dari aspek proses, isi dan jaminan tindak lanjut, yang masing-masing dibuat indeks dengan menggunakan pembobotan
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini

disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6,5
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.4
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung IKU

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
		3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
		2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
			1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
			3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna.

Tabel II.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,121,940
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,121,940
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,083,782,000
	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik	29,825,000
	2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66,900,000
	3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	374,651,560
	4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	612,405,440
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43,924,620
	1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	43,924,620
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	615,500,420
	1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	615,500,420
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		73,307,000
2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		103,493,000
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		52,118,000
4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		164,121,000
5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		181,571,000
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		355,969,000
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		184,177,000

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171,792,000
	3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	296,283,120
	1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64,564,000
	2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	133,255,500
	3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	98,463,620
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	74,570,000
	1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	74,570,000
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	74,147,950
	1) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	74,147,950
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	97,129,760
	1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	97,129,760
	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	305,813,410
	1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	148,247,270
	2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	157,566,140
JUMLAH		3,524,852,220

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran program yang mendukung indikator Indeks Kualitas Perencanaan sebesar Rp. 2.973.191.000,- yang terdiri dari tiga program pendukung, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Tiga program tersebut memberikan intervensi yang besar dalam tercapainya target kinerja. Sedangkan jumlah anggaran program pendukung indikator Indeks Daya Saing Daerah hanya sebesar Rp. 551.661.120,- yang hanya terdiri dari satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, khususnya pada pilar kapabilitas inovasi daerah yang mana pada pilar kapabilitas inovasi masih rendah kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkat inovasi daerah serta perlunya mengalokasikan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian. Program ini dinilai tidak banyak memberikan intervensi terhadap capaian Indeks Daya Saing Daerah karena hanya mendukung satu pilar yaitu Pilar Kapabilitas Inovasi dari dua belas pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang di susun secara periodik (satu tahun). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

3.2. ANALISIS KINERJA

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022.

Misi Keenam RPJMD 2021 – 2026

“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)”.

Tujuan

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran

- ❖ *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*
- ❖ *Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan*

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui 2 indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6,5	7,4	113,85
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,63	93,41
Nilai rata-rata capaian kinerja					103,63

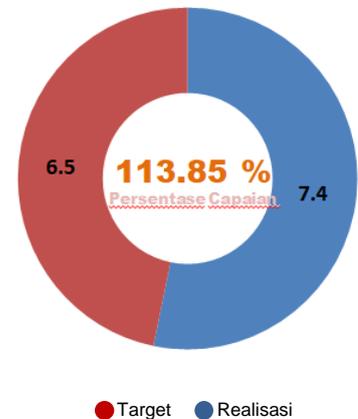
Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2022 terealisasi mencapai 103,63 %, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

INDEK KUALITAS PERENCANAAN

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) merupakan pengukuran perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) di daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna mempunyai target dengan nilai 6.5, adapun realisasi dengan nilai 7.4 sehingga dengan hasil tersebut maka capaian IKP Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar 113,85 %.



Pengukuran IKP Kabupaten Natuna melalui tiga Dimensi yaitu Proses, Isi Dokumen, dan Tindak Lanjut. Setiap dimensi Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) ditetapkan bobotnya. Penetapan bobot dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan tingkat kedalaman pengaruh setiap dimensi terhadap nilai total IKP. Penetapan bobot dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya dengan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Pada pengukuran IKP Kabupaten Natuna Tahun 2022 ditetapkan bobot dimensi sebagai berikut : Proses (25%), Isi Dokumen (35%), dan Tindak Lanjut (40%).

1. Dimensi Proses (Bobot 25%) terdiri dari 4 Sub-dimensi yang diwakili 4 indikator:

a. Tingkat Partisipasi OPD dalam Forum OPD

Diukur dengan tingkat kehadiran OPD dalam Forum OPD, dengan rumus perhitungan:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah OPD yang Menghadiri Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{30}{30} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Antusias OPD dalam mengikuti Forum OPD menunjukkan nilai maksimal, dapat dilihat pada tingkat kehadiran OPD. Ketepatan waktu kehadiran OPD

dalam Forum OPD juga menunjukkan nilai maksimal. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD.

b. Ketepatan Waktu OPD dalam Forum OPD

Diukur dengan ketepatan waktu OPD dalam saat menghadiri Forum OPD dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang Tepat Waktu Menghadiri Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Antusias OPD dalam mengikuti Forum OPD menunjukkan nilai maksimal, dapat dilihat pada tingkat kehadiran OPD. Ketepatan waktu kehadiran OPD dalam Forum OPD juga menunjukkan nilai maksimal. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD.

c. Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang

Diukur dengan tingkat kehadiran pemangku kepentingan yang diundang dalam Musrenbang dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemangku Kepentingan yang Hadir dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah Pemangku Kepentingan yang Diundang dalam Musrenbang}} \times 100\%$$

$$= \frac{98}{156} \times 100\%$$

$$= 62,82\%$$

Tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam Musrenbang sebesar **62,82%**. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam Musrenbang ini dikarenakan kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya musrenbang dalam pembangunan daerah, selain itu Masih adanya kelalaian peserta Musrenbang untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia juga menjadi penyebab tidak optimalnya data kehadiran partisipan.

d. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang

Diukur dengan ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang (sesuai ketentuan atau di luar ketentuan penyelenggaraan Musrenbang), dengan rumus perhitungan:

$$\text{Jika Pelaksanaan Musrenbang Tepat Waktu} = 100\%$$

$$\text{Jika Pelaksanaan Musrenbang Tidak Tepat Waktu} = 0\%$$

Musrenbang dilaksanakan tepat waktu (tidak melebihi pekan keempat bulan Maret)

= 100%

Musrenbang Kabupaten yang diselenggarakan sebelum minggu keempat bulan Maret sesuai ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 94 Ayat (4). Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang menunjukkan kematangan persiapan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku panitia penyelenggara dalam semua aspek penyelenggaraan Musrenbang yang menyangkut penyiapan bahan Musrenbang, koordinasi dengan Pimpinan Daerah, kesesuaian dengan jadwal pelayanan sarana transportasi laut (untuk peserta yang berasal dari luar Pulau Bunguran Besar), penyiapan tempat Musrenbang, penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung Musrenbang, dan sebagainya

2. Dimensi Isi Dokumen (Bobot 35%) terdiri dari 3 Sub-dimensi yang diwakili 3 indikator:

a. Ketersediaan Data IKU dan IKD

Diukur dengan jumlah tersedianya data IKU dan IKD dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah IKU dan IKD yang Tersedia Datanya}}{\text{Jumlah IKU dan IKD}} \times 100\%$$

$$= \frac{137}{492} \times 100\%$$

$$= 27,85\%$$

Rendahnya rasio ketersediaan data IKU dan IKD (**27,85%**) disebabkan oleh lambatnya OPD dalam menyampaikan data kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Diukur melalui survei dengan mengacu kepada Permen PANRB Nomo4 14 Tahun 2017.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikonversi ke dalam persentase (%).

$$= 80,27\%$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan nilai kepuasan masyarakat yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei yang dilakukan terhadap 100 responden (Pegawai Pemerintah

Kabupaten Natuna, Pegawai di Luar Pemerintah Kabupaten Natuna, dan masyarakat Kabupaten Natuna) yang mendapatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2022. Survei dilakukan sesuai pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Titik berat survei menekankan pada kualitas pelayanan perencanaan yang menyangkut beberapa aspek diantaranya syarat untuk mendapatkan pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan, dan sebagainya. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 sebesar **80,27** yang menunjukkan kinerja pelayanan pada predikat **BAIK**.

c. Keselarasan Program Antara RKPD dengan RPJMD

Diukur dengan jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai Dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$
$$= \frac{216}{216} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Dokumen RKPD hasil Musrenbang memuat 216 Program yang semuanya selaras dengan program yang ada dalam dokumen RPJMD (selaras **100%**). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada program hasil Musrenbang yang “liar”, sehingga dapat diartikan bahwa program RKPD adalah program yang membawa kepentingan publik sesuai dengan hasil kesepakatan dalam RPJMD.

3. Dimensi Tindak Lanjut (Bobot 40%) terdiri dari 4 Sub-dimensi yang diwakili 4 indikator:

a. Persentase Program Prioritas Pembangunan dalam RKPD yang Dianggarkan

Diukur dengan jumlah program prioritas dalam RKPD Tahun 2022 yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas dalam RKPD yang Dianggarkan}}{\text{Jumlah Program Prioritas dalam RKPD}} \times 100\%$$
$$= \frac{119}{122} \times 100\%$$
$$= 97,54\%$$

Dari 122 Program Prioritas dalam RKPD hasil Musrenbang, sebanyak 119 Program Prioritas dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 atau sebanyak **97,54%**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna memegang komitmen dalam menganggarkan program prioritas RKPD. Konsistensi penganggaran program prioritas RKPD akan membawa dampak naiknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan Musrenbang.

b. Persentase Capaian IKU

Diukur dengan jumlah IKU yang mencapai target pada tahun 2022 dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah IKU yang Mencapai Target (Kriteria TINGGI dan SANGAT TINGGI)}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{24} \times 100\%$$

$$= 62,50\%$$

Capaian IKU sebesar **62,50%** perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya IKU perlu dievaluasi oleh OPD yang bersangkutan serta dikoordinasikan dengan OPD lainnya. Pendalaman masalah serta upaya untuk mendapatkan solusi dapat dilalui dengan riset-riset dan kajian yang terkoordinir dan terstruktur secara baik.

c. Persentase Capaian IKD

Diukur dengan jumlah IKD yang mencapai target pada tahun 2022, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah IKD yang Mencapai Target (Kriteria TINGGI dan SANGAT TINGGI)}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$$

$$= \frac{85}{468} \times 100\%$$

$$= 18,16\%$$

Capaian IKD yang rendah (**18,16%**) disebabkan oleh keterlambatan penyampaian data dari OPD, selain juga disebabkan oleh adanya beberapa IKD yang tidak memenuhi target.

d. Rata-rata Tingkat Penyerapan Anggaran Setiap OPD

Diukur dengan rata-rata penyerapan anggaran (termasuk kecamatan) pada tahun 2022, dengan rumus perhitungan:

$$\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah Serapan Anggaran OPD}}{\text{Jumlah Anggaran OPD}} \times 100\% \right)$$

Jumlah OPD (Termasuk Kecamatan)

$$\begin{aligned} &= \frac{4157\%}{45} \\ &= 92,37\% \end{aligned}$$

Tingkat penyerapan anggaran tahun 2022 adalah baik. Dari seluruh OPD didapat rata-rata serapan anggaran sebesar **92,37%** yang menunjukkan bahwa OPD mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disediakan.

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) merupakan gabungan nilai indeks semua dimensi setelah dikalikan dengan bobotnya, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{100+100+62,82+100}{4} \times 25\% \right) + \left(\frac{27,85+80,27+100}{3} \times 35\% \right) + \left(\frac{97,54+62,50+18,16+92,37}{4} \times 40\% \right) \\ &= 22,68\% + 24,28\% + 27,06\% \\ &= 74,02\% \\ &= 7,40 \text{ (Skala 0-10)} \end{aligned}$$

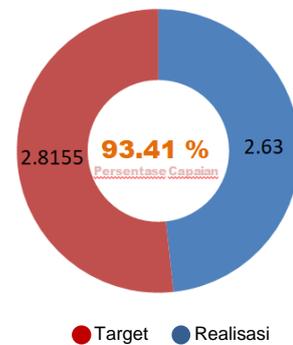
SASARAN 2

Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan

INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Berdasarkan Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna memperoleh Skori 2,63, sedangkan target IDSD Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar 2,8155, maka capaian IDSD Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar 93,41%.



Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Kerangka Pengukuran

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar III.1 berikut:

Tabel III.3
Kerangka Pengukuran IDSD 2022



Sumber: diadopsi dari Global Competitiveness Index (WEF, 2019)
Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

Komponen IDSD 2022



Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu **Institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; **Infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; **Adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan industri 4.0; dan **Stabilitas Ekonomi Makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.



Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu **Kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan **Keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.



Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu **Pasar Produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; **Pasar Tenaga Kerja** yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; **Sistem Keuangan** yang merefleksikan kemampuan system finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan **Ukuran Pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya Iptek.



Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu **Dinamisme Bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja; dan **Kapabilitas Inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Metodologi

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2022 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Gambar III.2
Metodologi Perhitungan IDSD 2022



Berdasarkan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh BRIN, Rincian Skor IDSD Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Skor IDSD Kabupaten Natuna 2022

Nasional / Provinsi/ Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosisten Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Kep. Riau	4,41	2,99	4,79	2,78	3,75	3,91	0,97	4,46	1,38	3,02	5,00	2,91	3,36
Natuna	4,24	3,65	2,93	2,40	3,46	3,32	0,70	2,37	1,83	0,96	5,00	0,68	2,63

Keterangan:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Pilar 1 : Institusi | Pilar 5 : Kesehatan | Pilar 9 : Sistem Keuangan |
| Pilar 2 : Infrastruktur | Pilar 6 : Keterampilan | Pilar 10 : Ukuran Pasar |
| Pilar 3 : Adopsi TIK | Pilar 7 : Pasar Produk | Pilar 11 : Dinamisme Bisnis |
| Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro | Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja | Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara total skor IDSD Kabupaten Natuna tahun 2022 adalah 2,63, berada dibawah skor IDSD Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, akan tetapi terdapat dua pilar yang melebihi skor Provinsi yaitu pilar Infrastruktur dan Pilar Sistem Keuangan, dan ada dua pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional, yaitu pilar Institusi dan Pilar Infrastruktur. Selanjutnya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya meningkat nilai IDSD tahun berikutnya, yaitu pada pilar Pasar Produk, Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Kapabilitas Inovasi.

Berikut penjelasan masing-masing pilar serta dimensi, indikator dan sumber datanya:

PILAR 1: INSTITUSI

Skor Pilar Institusi Kabupaten Natuna adalah 4,24, lebih tinggi dari skor nasional yang hanya 4,14. Ini menandakan bahwa Kabupaten Natuna memiliki institusi yang kuat, Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Pelaku ekonomi akan berinvestasi di suatu daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif.

Tabel III.5
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Institusi

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Keamanan	Kejadian Pungutan Liar Tingkat Pembunuhan	Kemenko Polhukam Mabes Polri & BPS
Check & Balances	Transparansi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPK Kemenpan RB Kemenpan RB Kemenpan RB
Transparansi Hak Atas Kepemilikan	Upaya Pencegahan Korupsi Hak atas kepemilikan Kualitas administrasi pertanahan	KPK Mabes Polri & BPS Kemen ATR/ BPS
Orientasi masa depan pemerintah	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK

PILAR 2: INFRASTRUKTUR

Skor Pilar Infrastruktur Kabupaten Natuna adalah 3,65 lebih tinggi dari skor provinsi dan Nasional yang hanya 2,99 dan 2,91. Tingginya skor pilar infrastruktur merupakan hasil dari komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan. Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

Tabel III.6
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Infrastruktur

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Infrastruktur Transportasi	Konektivitas jalan Kualitas infrastruktur jalan Proporsi jumlah stasiun kereta api Proporsi jumlah bandara Proporsi jumlah pelabuhan	Kemen PUPR Kemen PUPR Kemen Perhubungan Kemen Perhubungan Kemen Perhubungan
Infrastruktur utilitas Kelistrikan	Rasio elektrifikasi	Kemen ESDM
Infrastruktur Utilitas air minum	Air minum layak	Kemen PUPR

PILAR 3: ADOPSI TIK

Skor pilar adopsi TIK Kabupaten Natuna adalah 2,93 dibawah skor Provinsi dan Nasional. Hingga saat ini masih banyaknya daerah di Kabupaten Natuna yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang memadai sehingga belum mampu memaksimalkan penggunaan TIK. Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih

produktif. Pada tahun 2021, melalui program Bakti Kominfo, telah mulai di bangun beberapa BTS di daerah yang terisolir dari jaringan komunikasi, semoga adopsi TIK dapat merata diseluruh daerah Kabupaten Natuna.

Tabel III.7
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Adopsi TIK

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Adopsi TIK	Pengguna telepon seluler	BPS
Transportasi	Jangkauan jaringan 4G	Kemen Kominfo
	Pelanggan internet fixed-broadband	Kemen Kominfo & BPS
	Pengguna internet	BPS

PILAR 4: STABILITAS EKONOMI MAKRO

Pilar stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro yang stabil merupakan kunci kepercayaan investor dan memudahkan pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Ekonomi makro yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor baik lokal maupun mancanegara untuk berinvestasi di suatu daerah. Skor Pilar stabilitas ekonomi makro Kabupaten Natuna tahun 2022 adalah 2,40, dibawah skor Provinsi dan Nasional.

Tabel III.8
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Stabilitas Ekonomi Makro

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kestabilan Ekonomi Makro	Kapasitas fiskal daerah	Kemen Keuangan
	Pertumbuhan ekonomi	BPS
	Tingkat pengangguran terbuka	Kemen PPN/Bappenas
	Indeks ketahanan pangan	Kemen Pertanian
	Nilai investasi	BPS
	PDRB per kapita	BPS

PILAR 5: KESEHATAN

Skor pilar kesehatan pada tahun 2022 adalah 3,46. Skor ini cukup tinggi mendekati skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,75 dan 3,76. Pilar kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data BPS, angka harapan hidup kabupaten natuna tahun 2022 cukup tinggi yaitu 65,76. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif.

Tabel III.9
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Angka Harapan Hidup

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	BPS

PILAR 6: KETERAMPILAN

Skor Pilar Keterampilan tahun 2022 adalah 3,32, skor ini cukup tinggi akan tetapi masih dibawa skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,91 dan 3,73. Pilar keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis karena menjadi penyeimbang antara integrasi teknologi dan investasi modal manusia (Lawler, et.al. 2003). Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis.

Tabel III.10
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Keterampilan

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Tenaga kerja saat ini	Rata-rata lama sekolah	BPS
	Keterampilan lulusan	BPS
Tenaga kerja masa depan	Kemudahan menemukan pekerja terampil	BPS
	Angka harapan sekolah	BPS
	Berfikir kritis dalam mengajar	Kemendikbudristek
	Rasio murid-guru pendidikan dasar	Kemendikbudristek

PILAR 7: PASAR PRODUK

Skor pilar pasar produk tahun 2022 sebesar 0,70, dibawah skor Provinsi dan Nasional yaitu 0,97 dan 2,68. Skor ini tergolong rendah dan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Natuna agar skor pilar pasar produk meningkat dimasa mendatang. Rendahnya nilai pasar produk dikarenakan masih kurangnya kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar. Perlunya bantuan modal bagi UMKM agar bisa bersaing dengan kelompok usaha sedang dan besar

Tabel III.11
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Produk

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Persaingan Domestik	Persaingan sector jasa	BPS

PILAR 8: PASAR TENAGA KERJA

Skor pilar pasar tenaga kerja tahun 2022 adalah 2,37, dibawah skor provinsi dan Nasional yaitu 4,46 dan 3,73. Fleksibilitas tenaga kerja dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Investor akan mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan dibayar, dalam menanamkan modal bisnisnya. Tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima dan kesejahteraan sosial lainnya dalam memutuskan untuk bekerja. Pasar

tenaga kerja yang efisien, dimana kepentingan investor dan tenaga kerja terfasilitasi akan mendorong produktivitas.

Tabel III.12
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Tenaga Kerja

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Fleksibilitas	Kebijakan pasar tenaga kerja	BPS
	Upah pekerja	BPS
Meritokrasi dan insentif	Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki	BPS

PILAR 9: SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Sistem keuangan yang kuat tidak hanya memediasi alokasi sumber daya keuangan yang efisien tapi juga memitigasi potensi krisis keuangan. Skor pilar sistem keuangan Kabupaten Natuna tahun 2022 adalah 1,83.

Tabel III.13
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Sistem Keuangan

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kedalaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Penduduk	Kemen Keuangan & BPS

PILAR 10: UKURAN PASAR

Skor pilar pasar tahun 2022 sebesar 0,96, skor ini sangat rendah dan di bawah skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,02 dan 1,31. Pilar ukuran pasar memengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industry sehingga meningkatkan nilai tambah salah satu dimensi dari pilar ukuran pasar adalah PDRB.

Tabel III.14
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Ukuran Pasar	PDRB	BPS

PILAR 11: DINAMISME BISNIS

Skor pilar dinamisme bisnis tahun 2022 adalah 5,00, skor ini cukup tinggi, sama dengan skor Provinsi dan Nasional. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. Secara administratif, rendahnya hambatan untuk memulai bisnis serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan keluar masuk pasar.

Sektor swasta yang gesit dan dinamis dapat meningkatkan produktivitas dengan mengambil risiko bisnis, menguji ide-ide baru, dan menciptakan produk serta layanan yang inovatif.

Tabel III.15
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Persyaratan administrasi	Biaya untuk memulai usaha	KemenkumHAM & BKPM
	Waktu untuk memulai usaha	KemenkumHAM & BKPM

PILAR 12: KAPABILITAS INOVASI

Pada tahun 2022 Skor pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Natuna hanya 0,68, sangat rendah jika dibandingkan dengan skor Provinsi dan Nasional yaitu 2,91 dan 2,62. Hal ini menerangkan bahwa masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan penyediaan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penyelesaian isu strategis daerah.

Tabel III.16
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kapabilitas Inovasi

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Keanekaragaman dan kolaborasi Riset	Keanekaragaman tenaga kerja	BPS
	Pubikasi ilmiah Aplikasi kekayaan intelektual (KI)	Kemendikbudristek Kemendikbudristek, KemenkumHAM & Kementan
	Belanja riset	Kemendagri & Kemendikbudristek
Komersialisasi	Indeks keunggulan lembaga riset	Kemendikbudristek
	Aplikasi merk dagang	Kemendikbudristek & KemenkumHAM

Upaya meningkatkan daya saing daerah memerlukan peran penting pemerintah dalam mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki *stakeholders* terkait dengan dukungan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam Musrenbang serta kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya musrenbang dalam pembangunan daerah.
2. Rendahnya rasio ketersediaan data IKU dan IKD disebabkan oleh lambatnya OPD dalam menyampaikan data kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Rendahnya persentase capaian IKU dan IKD disebabkan oleh keterlambatan penyampaian data dari OPD, selain juga disebabkan oleh adanya beberapa IKU dan IKD yang tidak memenuhi target.
4. Pada pilar Pasar Produk, rendahnya nilai pasar produk dikarenakan masih kurangnya kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar.
5. Pada pilar kapabilitas inovasi masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkat inovasi daerah serta perlunya mengalokasikan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian.
6. Belum adanya program lintas sektoral, dan kolaborasi antar pelaku kepentingan di Kabupaten Natuna. Program lintas sektoral terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan meningkatkan pembiayaan bagi koperasi, peningkatan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi serta melakukan komersialisasi inovasi.
7. Tidak adanya kepastian anggaran sehingga program dan kegiatan tidak bisa dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan guna percepatan meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait peningkatan capaian IKU dan IKK serta pengumpulan data pengukuran kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di luar OPD untuk mendapatkan hubungan yang harmonis serta meningkatnya

tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

4. Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Tahun 2023 dan tahun berikutnya perlu adanya penyempurnaan instrumen pengukuran, diantaranya dengan penggunaan metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** dalam penentuan bobot setiap dimensi dan sub-dimensi.
5. Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Tahun 2023 dan tahun berikutnya dapat memodifikasi sub-dimensi berupa penambahan sub-dimensi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang.
6. Meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
7. Mendorong kapasitas inovasi dengan mengalokasikan anggaran riset, penguatan SDM Iptek, meningkatkan Hak Paten dan Merk, membuka investasi pihak ke-3.
8. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
9. Perlibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri kreatif.
10. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif;

Secara umum keberhasilan pencapaian keseluruhan indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna antara lain didukung oleh:

1. Pelaksanaan perencanaan yang telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna (*e-Planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Semua proses perencanaan telah menggunakan sistem aplikasi Infis Perencanaan (*e-planning*).
2. Dalam pencapaian indikator kinerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi pencapaian program dan kegiatan setiap Triwulan yaitu Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
3. Melaksanakan monitoring dan rewiu secara berkala terhadap Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

4. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Natuna.
5. Melaksanakan monitoring pencapaian target jangka menengah semua program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi laporan kinerja BP3D dan hasil evaluasi lainnya seperti hasil evaluasi rancangan akhir RKPD dan hasil evaluasi lainnya dari Inspektorat Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dalam mencapai indikator program dan kegiatan, setiap bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membawahi SKPD sesuai bidangnya melakukan koordinasi evaluasi program dan kegiatan dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kerjanya.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2021 – 2022 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 – 2022
Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

No.	Nasional/Prov/ Kab	Indeks Kualitas Perencanaan		Indeks Daya Saing Daerah	
		2021	2022	2021	2022
1	Nasional	n.a	n.a	n.a	3,26
2	Provinsi Kep. Riau	n.a	n.a	2.981	3,36
3	Kabupaten Natuna	6,3	7,4	2,726	2,63

Berdasarkan table diatas, Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2022 terealisasi sebesar 7,4 meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yaitu 6,3. Untuk Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi dan Nasional datanya tidak tersedia. Sedangkan pada Indeks Daya Saing Daerah terealisasi sebesar 2,63 atau terdapat penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2,726 hal ini dikarenakan metode pengukuran IDSD 2022 berbeda dengan IDSD 2021, pada tahun 2021 pengukuran IDSD dilakukan dengan metode penginputan yang dilakukan pemerintah daerah sebanyak 97 indikator pada aplikasi Badan Riset Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 metode pengukuran dilakukan dengan mengolah data sekunder dari K/L penyedia data, untuk kabupaten/kota sebanyak 48 indikator. Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Natuna masih dibawah Provinsi pada tahun 2021 yaitu 2,981, untuk data Nasional tahun 2021

tidak tersedia. Sedangkan pada tahun 2022 masih dibawah Provinsi yaitu dan 3,36 dan Nasional 3,26.

Realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja terhadap RPJMD untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel III.18 berikut:

Tabel III.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2022			Target RPJMD	Capaian terhadap RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6,5	7,4	113,85	8,1	91,36
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan							
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,63	93,41	3,1255	84,15

3.3 ANALISIS KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85), alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar Rp. 10.073.069.615,- (Sepuluh milyar tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 209), anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp. 1.541.831.345,- (Satu milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp. Rp.11.614.900.960,- (Sebelas milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Tabel III.19
Laporan Realisasi Anggaran

Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Nilai Laporan LKJIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,121,940	892,936	28,60	93,79
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,121,940	892,936	28,60	
Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,520,502,997	6,120,135,609	93,86	125,00
		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,520,502,997	6,120,135,609	93,86	
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	794,431,640	509.894.317	64,18	
		1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149,300,000	3,240,000	2,17	
		2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,500,000	12,100,000	73,33	
		3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,000,000	28,000,000	100,00	
		4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,168,000	38,182,000	88,45	
		5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	2,100,000	10,50	
		6) Penyediaan Bahan/Material	40,000,000	29,492,000	73,73	
		7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497,463,640	396,780,317	79,76	
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435,292,103	424.823.943	97,60	
		1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000	7,920,000	99,00	
		2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,736,000	12,584,500	60,69	
		3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406,556,103	404,319,443	99,45	

Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,822,000	289.645.321	85,23	
		1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117,982,000	75,918,900	64,35	
		2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221,840,000	213,726,421	96,34	
Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,083,782,000	787,046,634	67,95	109,11
		1) Pelaksanaan Konsultasi Publik	29,825,000	5,155,000	17,28	
		2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66,900,000	49,615,000	74,16	
		3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	374,651,560	319,589,912	85,30	
		4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	612,405,440	410,046,722	66,96	
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43,924,620	0	0,00	
		1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	43,924,620	0	0,00	
		3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	615,500,420	242,785,778	39,45	

Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
		1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	615,500,420	242,785,778	39,45	
Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	574,610,000	151,070,664	26,29	94,70
		1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	73,307,000	0	0,00	
		2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	103,493,000	23,242,194	22,46	
		3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52,118,000	31,117,800	59,71	
		4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	164,121,000	11,972,800	7,30	
		5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	181,571,000	84,737,870	46,67	

Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Persentase Program Rpjmd Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	355,969,000	94,925,140	26,67	128,38
		1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	184,177,000	38,658,451	20,99	
		2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171,792,000	56,266,689	32,75	
Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	296,283,120	82,830,477	27,96	97,13
		1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64,564,000	15,267,600	23,65	
		2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	133,255,500	53,375,677	40,06	
		3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	98,463,620	14,187,200	14,41	
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	74,570,000	2,640,000	3,54	0,00

Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
		1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	74,570,000	2,640,000	3,54	
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	74,147,950	0	0,00	
		1) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	74,147,950	0	0,00	
		3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	97,129,760	0	0,00	
		1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	97,129,760	0	0,00	
Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	305,813,410	122,812,440	40,16	75,46
		1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	148,247,270	64,781,340	43,70	
		2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	157,566,140	58,031,100	36,83	
JUMLAH			11,614,900,960	8,826,863,259	76,00	

Akuntabilitas kinerja juga dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan. Secara umum akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp.11.614.900.960,- dialokasikan sebesar Rp. 3.524.852.220,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.485,004,069- atau 42,13%, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 103,63%. Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar 30,35%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,65%. Dari angka efisiensi anggaran sebesar 30,35% disebabkan karena adanya penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibebankan di belanja langsung. Apabila dibandingkan dengan belanja langsung di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN maka didapat efisiensi sebesar 69,19% yang mana dapat dinilai baik.



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2022. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah sebesar Rp.11.614.900.960,- (Sebelas milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Sasaran ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan*** sebesar Rp. 3.524.852.220,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Sasaran strategis Meningkatkan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatkan Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan yang tercakup dalam 4 program dan 15 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2022 dapat dicapai sepenuhnya dengan capaian 103,63% dengan kategori “**AA atau SANGAT MEMUASKAN**”. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022. Faktor pendukung capaian indikator sasaran diantaranya keberhasilan kegiatan Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) dengan

aplikasi Infis Perencanaan Kabupaten Natuna (*e-planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik dalam internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui evaluasi hasil RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan, dan peran pimpinan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendampingi dan menekankan kepada bidang-bidang yang membawahi SKPD sesuai bidangnya dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kerjanya sehingga dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel IV.1
CAPAIAN KINERJA TAHUNAN
BERDASARKAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2021-2026
TAHUN ANGGARAN 2022

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)”				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja
				2022
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	113,85
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	93,41
Nilai rata-rata capaian kinerja				103,63

Pada tabel diatas hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2022 saja karena berdasarkan renstra 2021-2026 berbeda dengan IKU sebelumnya dan tidak adanya target yang ditetapkan pada tahun 2021. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Tahun 2022 diantaranya agar dapat melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi serta meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 24 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6.5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.961.104.405,00
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	654.109.120,00
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.862.531.590,00
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.595.324.500,00
Jumlah	Rp.	10.073.069.615,00

Ranai, 12 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 10.185.195.301,00 (Sepuluh milyar seratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus satu) menjadi Rp. 11.614.900.960,00 (Sebelas milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam puluh) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022
Pihak Pertama,

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6.5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.093.170.680,00
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	551.661.120,00
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.743.207.040,00
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.226.862.120,00
Jumlah	Rp.	11.614.900.960,00

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6.5	7.4	113.85
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2.8155	2.63	93.41

Jumlah Anggaran :

	Target	Realisasi	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8,093,170,680.00	Rp. 7,345,392,126.77	90.76
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 551,661,120.00	Rp. 125,452,440.00	22.74
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rp. 1,743,207,040.00	Rp. 1,027,192,412.00	58.93
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,226,862,120.00	Rp. 328,826,281.00	26.80
Jumlah	Rp. 11,614,900,960.00	Rp. 8,826,863,259.77	76.00

Ranai, 18 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

Kode	Sasaran	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Anggaran Renc Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang diwujudkan	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc PD yang diwujudkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc 2022 yang diwujudkan (%)		Realisasi Kinerja Rencro PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Rencro PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah
						I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/Sx100				
						8		9		10		11		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	66,900,000	1	49,615,000	0	0	0	0	0	0	1.00	49,615,000	100.00	74.16	1.00	49,615,000	16.67	8.70	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	374,613,560	1	145,433,000	0	174,156,912	0	0	0	0	1.00	319,589,912	100.00	85.30	1.00	319,589,912	16.67	22.83	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dibagikan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	2	612,405,440	0	0	1	5,096,000	1	265,810,895	0	145,046,837	2.00	415,961,722	100.00	67.92	2.00	415,961,722	16.67	12.60	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterlambatan Data Daerah	Persentase	90	43,924,620	0	0	0	97.86	0	97.86	0	97.86	0	108.73	0.00	97.86	-	103.01	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	43,924,620	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100.00	0.00	3.00	-	16.67	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persentase	25	615,900,420	0	25,288,874	0	73,274,117	64.29	0	64.29	144,222,787	64.29	242,785,778	257.16	39.45	64.29	242,785,778	85.72	15.56	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	615,900,420	1	25,288,874	1	73,274,117	1	0	2	144,222,787	5	242,785,778	125.00	39.45	5.00	242,785,778	20.83	15.56	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENILAIAN PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD	Persentase	96	98,463,620	93.24	0	93.24	0	93.24	0	93.24	14,187,200	93.24	14,187,200	97.13	14.41	93.24	14,187,200	99.19	2.36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	96	98,463,620	93.24	0	93.24	0	93.24	0	93.24	14,187,200	93.24	14,187,200	97.13	14.41	93.24	14,187,200	100.26	2.36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	98,463,620	0	0	0	0	0	1	14,187,200.00	1	14,187,200	100.00	14.41	1.00	14,187,200	20.00	2.36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase	96	197,819,900	93.24	12,310,000	93.24	18,155,200	93.24	3,168,000	93.24	35,010,077	93.24	68,643,277	97.13	34.70	93.24	68,643,277	99.19	8.17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Rencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	96	197,819,900	72.97	12,310,000	72.97	18,155,200	72.97	3,168,000	72.97	35,010,077	72.97	68,643,277	76.01	34.70	72.97	68,643,277	78.46	8.17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	64,564,000	4	12,310,000	0	0	0	0	0	2,957,600	4	15,267,600	100.00	23.65	4.00	15,267,600	26.67	3.64	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	133,255,500	0	0	0	18,155,200	0	3,168,000	1	32,052,477	1	53,375,677	100.00	40.06	1.00	53,375,677	6.67	12.71	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase	96	574,010,000	93.24	18,928,200	93.24	41,199,900	90.91	30,531,170	90.91	60,411,394	90.91	151,070,664	94.70	26.29	90.91	151,070,664	96.71	4.80	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Rencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	96	574,010,000	93.24	18,928,200	93.24	41,199,900	90.91	30,531,170	90.91	60,411,394	90.91	151,070,664	94.70	26.29	90.91	151,070,664	94.70	4.80	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	1	73,307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	1	103,493,000	0	0	0	1,584,000	0	1,848,000	1	19,810,194	1	23,242,194	100.00	22.46	1.00	23,242,194	2.50	4.23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	12	52,118,000	8	7,361,000	8	13,249,000	8	3,488,000	8	7,259,800	32	31,117,800	266.87	59.71	32.00	31,117,800	53.33	5.66	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	164,121,000	8	0	0	0	0	0	8	11,972,800	16	11,972,800	145.45	7.30	16.00	11,972,800	200.00	1.73	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	181,571,000	8	11,567,200	0	26,366,900	8	25,435,170	0	21,368,600	16	84,737,870	133.33	46.67	16.00	84,737,870	266.67	10.59	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Persentase	76	356,013,000	0	9,764,400	86.32	22,974,000	98.33	18,790,689	98.33	43,396,051	98.33	94,925,140	129.38	26.66	98.33	94,925,140	104.61	11.87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Rencana Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	92	356,013,000	0	9,764,400	94.83	22,974,000	94.83	18,790,689	94.83	43,396,051	94.83	94,925,140	103.08	26.66	94.83	94,925,140	101.97	11.87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dibagikan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	184,221,000	3	9,764,400	0	456,000	2	684,000	3	27,754,051	8	38,658,451	200.00	20.98	8.00	38,658,451	32.00	9.66	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dibagikan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	171,792,000	0	0	2	22,518,000	0	18,106,689	10	15,642,000	12	56,266,689	300.00	32.75	12.00	56,266,689	48.00	14.07	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah		
						I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/3x100				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
5.05.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	INDEKS INOVASI DAERAH	Indeks	65	305,813,410	0	0	0	0	17,451,940	0	11,276,000	49.05	94,084,500	49.05	122,812,440	75.46	40.16	49.05	122,812,440	75.46	5.66	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase	100	305,813,410	0	0	95.65	17,451,940	95.65	11,276,000	100.00	94,084,500	100.00	122,812,440	100.00	40.16	100.00	122,812,440	100.00	5.66	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	148,247,270	0	0	0	17,451,940.00	0	11,276,000.00	1	36,053,400.00	1	64,781,340	100.00	43.70	1.00	64,781,340	16.67	6.05	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02.2.04.03		Diembalasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diembalasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	157,566,140	0	0	0	0	0	0	1	58,031,100.00	1	58,031,100	100.00	36.83	1.00	58,031,100	20.00	5.28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELTBANGAN	Persentase	3	245,847,710	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0.00	2,640,000	-	1.07	-	2,640,000	-	0.16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang dan Kelitbang Bidang Pemerintahan	Persentase	100	74,570,000	0	0	0	2,640,000	0	0	100	0	100.00	2,640,000	100.00	3.54	100.00	2,640,000	100.00	6.50	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02.2.01.12.		Pengkajian Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkumpul dengan Baik	Laporan	1	74,570,000	0	0	0	2,640,000.00	0	0	1	1	2,640,000	100.00	3.54	1.00	2,640,000	20.00	0.50	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	74,147,950	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	-	100.00	0.00	100.00	-	100.00	-	0.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	74,147,950	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100.00	0.00	1.00	-	20.00	-	0.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	100	97,129,760	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	-	100.00	0.00	100.00	-	100.00	-	0.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	97,129,760	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100.00	0.00	1.00	-	20.00	-	0.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

